

Narasi Kebijakan di Era Disinformasi: Transformasi Pengambilan Keputusan Publik dalam Ekosistem Informasi Digital

Diryo Suparto¹, Kushandajani², Ida Hayu Dwimawanti³

Tri Yuningsih⁴, Ketut Purwantoro⁵

¹University Pancaskti Tegal,

^{2,3,4}niversity Diponegoro Semarang

⁵University Dian Nuswantoro Semarang

suparto.diryo@gmail.com¹, kushandajani@live.undip.ac.id²,

ida2hade@gmail.com³, ibutriyuningsih@gmail.com⁴.

ketut.purwantoro@dsn.dinus.ac.id⁵

ABSTRACT

The dissemination of information through digital platforms has fundamentally transformed the processes of public policy formulation and decision-making. On the one hand, advances in communication technologies have enabled greater public participation and broader access to information. On the other hand, the proliferation of disinformation, narrative manipulation, and the fragmentation of the digital public sphere have the potential to affect the quality of government policies. This study aims to analyze the transformation of public decision-making processes within the digital information ecosystem characterized by the increasing production and distribution of disinformation. The research employed a descriptive qualitative approach through a systematic literature review by examining academic publications, policy documents, reports from international institutions, and national regulations related to digital information governance. The analysis was conducted using the policy narrative approach, the New Public Governance perspective, and policy network theory. The findings indicate that public decision-making is no longer dominated solely by government actors but is influenced by complex interactions among governments, digital platforms, mass media, civil society organizations, and interest groups. Disinformation plays a significant role in shaping public perceptions, altering policy agendas, and influencing the legitimacy of governmental decisions. Therefore, strengthening collaborative governance, enhancing digital literacy, and developing multi-stakeholder information verification mechanisms are essential to safeguarding democratic quality and improving the effectiveness of public policies in the digital era.

Keywords : policy narratives; disinformation; public decision-making; network governance; digital ecosystem.

ABSTRAK

Diseminasi informasi melalui platform digital telah mengubah secara mendasar proses pembentukan dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Di satu sisi, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dan akses informasi yang lebih luas. Namun, di sisi lain, penyebaran disinformasi, manipulasi narasi, serta fragmentasi ruang publik digital berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi proses pengambilan keputusan publik dalam ekosistem informasi digital yang ditandai oleh meningkatnya produksi dan distribusi disinformasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan sistematis dengan menelaah berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, serta regulasi nasional yang berkaitan dengan tata kelola informasi digital. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan

narasi kebijakan, New Public Governance, dan teori jaringan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan publik tidak lagi didominasi oleh aktor pemerintah, tetapi dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara pemerintah, platform digital, media massa, komunitas masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan. Disinformasi berperan dalam membentuk persepsi publik, mengubah agenda kebijakan, serta memengaruhi legitimasi keputusan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kolaboratif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan mekanisme verifikasi informasi berbasis multipemangku kepentingan guna menjaga kualitas demokrasi dan efektivitas kebijakan publik di era digital.

Kata kunci : narasi kebijakan, disinformasi, pengambilan keputusan publik, tata kelola jaringan, ekosistem digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah menghasilkan transformasi signifikan dalam hubungan antara negara, masyarakat, dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemunculan media sosial, platform berbagi informasi, serta aplikasi komunikasi instan telah memperluas akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses kebijakan. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya ekosistem informasi digital yang dinamis, interaktif, dan lintas batas.

Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya produksi dan penyebaran disinformasi. Informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau sengaja diproduksi untuk tujuan politik tertentu dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu publik. Disinformasi tidak hanya berdampak pada perilaku individu, tetapi juga berpotensi mengubah arah diskursus kebijakan dan menurunkan legitimasi keputusan pemerintah.

Fenomena penyebaran informasi palsu selama pandemi COVID-19, penyelenggaraan pemilihan umum, maupun isu kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa narasi yang berkembang di ruang digital memiliki kemampuan membentuk opini publik secara cepat. Dalam konteks tersebut, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap didasarkan pada bukti empiris dan kepentingan publik, bukan semata-mata respons terhadap tekanan opini yang terbentuk akibat manipulasi informasi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Tingginya penetrasi internet telah meningkatkan intensitas pertukaran informasi melalui berbagai platform digital. Bersamaan dengan itu, berbagai laporan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memilah informasi yang kredibel, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyebaran berita palsu.

Kerangka regulasi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan ruang digital antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020

Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas disinformasi yang berkembang secara cepat melalui jejaring digital global.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tiga isu utama, yaitu :

1. Studi mengenai dampak media sosial terhadap perilaku politik masyarakat.
2. Penelitian mengenai penyebaran hoaks dan tingkat literasi digital.
3. Kajian mengenai tata kelola platform digital dan moderasi konten.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana narasi yang berkembang dalam ruang digital memengaruhi mekanisme pengambilan keputusan kebijakan publik.

Kajian mengenai disinformasi dalam ruang digital telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pola penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial, karakteristik konten yang bersifat menyesatkan, serta mekanisme amplifikasi informasi oleh algoritma platform digital. Selain itu, sejumlah studi juga menelaah perilaku pengguna dalam mengonsumsi, mempercayai, dan mendistribusikan informasi digital, termasuk faktor-faktor psikologis, sosial, dan politik yang memengaruhi kerentanan masyarakat terhadap paparan disinformasi. Kajian lainnya menitikberatkan pada strategi peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas verifikasi fakta, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengurangi penyebaran informasi palsu. Beberapa penelitian juga telah mengungkap dampak disinformasi terhadap pembentukan opini publik, penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta meningkatnya polarisasi politik di berbagai negara. Beragam temuan tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai karakteristik, pola penyebaran, dan konsekuensi disinformasi dalam ekosistem komunikasi digital.

Namun demikian, penelitian terdahulu masih menyisakan ruang kajian yang perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam. Sebagian besar studi cenderung menempatkan disinformasi sebagai persoalan komunikasi dan perilaku pengguna, sehingga belum banyak mengkaji bagaimana narasi kebijakan dibentuk, dikontestasikan, dan dipertahankan dalam lingkungan informasi yang dipenuhi oleh arus informasi yang saling bersaing dan berpotensi menyesatkan. Sejauh penelusuran penulis, studi yang secara khusus membahas pengaruh disinformasi terhadap proses agenda setting, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, serta pengambilan keputusan publik masih relatif terbatas. Demikian pula, relasi antara aktor pemerintah, platform digital, media massa, kelompok kepentingan, dan masyarakat dalam membentuk persepsi terhadap suatu kebijakan belum banyak

dianalisis secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan konseptual maupun empiris, terutama karena penelitian yang mengintegrasikan perspektif narasi kebijakan, tata kelola digital, dan disinformasi dalam satu kerangka analisis masih belum berkembang secara memadai.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengambilan keputusan publik di tengah ekosistem informasi digital yang semakin dipengaruhi oleh disinformasi. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana

narasi kebijakan diproduksi, disebarluaskan, diperdebatkan, dan diperebutkan oleh berbagai aktor, baik pemerintah, media massa, platform digital, maupun masyarakat sebagai penerima sekaligus produsen informasi. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif konseptual yang menghubungkan teori narasi kebijakan, disinformasi digital, dan tata kelola kebijakan publik guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika pembentukan persepsi dan legitimasi kebijakan pada era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian kebijakan publik kontemporer, khususnya mengenai dinamika pembentukan legitimasi kebijakan dalam ekosistem informasi digital yang semakin kompleks.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada kajian penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial, penguatan literasi digital, praktik verifikasi fakta, serta pengaruh disinformasi terhadap pembentukan opini publik dan perilaku politik, penelitian ini berupaya menempatkan disinformasi dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai faktor yang memengaruhi dinamika kebijakan publik. Sejumlah studi mengenai tata kelola digital juga cenderung menekankan aspek regulasi platform, pengelolaan data, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, namun masih relatif terbatas dalam menjelaskan bagaimana disinformasi membentuk konstruksi makna, memengaruhi preferensi aktor kebijakan, serta mengubah proses pengambilan keputusan publik. Penelitian ini tidak hanya memandang disinformasi sebagai persoalan kualitas informasi, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi proses kebijakan publik melalui pembentukan persepsi, kontestasi wacana, dan perubahan orientasi kebijakan yang berlangsung dalam ruang komunikasi digital yang semakin kompleks.

Novelty penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif *Policy Narrative Framework* (PNF), disinformasi digital, dan tata kelola digital ke dalam satu kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami transformasi proses pengambilan keputusan publik di era informasi digital. Berbeda dengan pendekatan terdahulu yang umumnya mengkaji ketiga aspek tersebut secara terpisah, penelitian ini menempatkan disinformasi sebagai variabel yang memengaruhi proses *agenda setting*, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, serta pengambilan keputusan publik. Kontribusi konseptual penelitian ini adalah penyajian perspektif yang menjelaskan bagaimana narasi kebijakan diproduksi, diperebutkan, dikontestasikan, dan dipertahankan oleh pemerintah, media massa, platform digital, serta masyarakat

dalam ekosistem informasi digital. Penelitian ini menawarkan perspektif analitis yang belum banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara persaingan narasi, disinformasi, dan pembentukan legitimasi kebijakan pada era komunikasi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian kebijakan publik digital serta memperluas pemahaman mengenai proses pembentukan legitimasi kebijakan di tengah meningkatnya arus disinformasi dalam ekosistem informasi kontemporer.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun untuk mengeksplorasi dinamika pembentukan narasi kebijakan dalam lingkungan informasi digital yang semakin kompleks, mengidentifikasi pengaruh disinformasi terhadap tahapan proses kebijakan publik, serta menganalisis relasi antaraktor yang terlibat dalam produksi dan kontestasi narasi kebijakan.

1. Bagaimana narasi kebijakan dibentuk, diproduksi, dan dikontestasikan dalam ekosistem informasi digital yang dipengaruhi oleh disinformasi?
2. Bagaimana disinformasi memengaruhi proses agenda setting, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan pengambilan keputusan publik?
3. Bagaimana interaksi antara pemerintah, media massa, platform digital, dan masyarakat berkontribusi dalam pembentukan, penyebaran, serta perebutan narasi kebijakan di era disinformasi?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengambilan keputusan publik dalam ekosistem informasi digital yang dipengaruhi oleh disinformasi, serta mengidentifikasi perubahan dinamika kebijakan publik yang muncul akibat meningkatnya kontestasi informasi pada ruang digital. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana narasi kebijakan diproduksi, disebarluaskan, dikontestasikan, dan dipertahankan oleh berbagai aktor, termasuk pemerintah, media massa, platform digital, kelompok kepentingan, dan masyarakat, dalam proses pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk menginterpretasikan pengaruh disinformasi terhadap tahapan agenda setting, formulasi kebijakan, serta proses pembentukan dan pemeliharaan legitimasi kebijakan publik di tengah lingkungan informasi yang semakin kompleks, cepat berubah, dan terfragmentasi. Secara konseptual, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan pemahaman mengenai keterkaitan antara *Policy Narrative Framework*, disinformasi digital, dan tata kelola digital sebagai landasan analitis dalam memahami perubahan pola interaksi antara informasi, aktor kebijakan, dan proses pengambilan keputusan publik. Penelitian ini juga menawarkan perspektif analitis yang dapat digunakan untuk menjelaskan mekanisme pembentukan legitimasi kebijakan pada era disrupsi informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian kebijakan publik digital serta memperluas pemahaman mengenai pembentukan

legitimasi kebijakan di tengah meningkatnya arus disinformasi dalam ekosistem informasi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR) yang dipadukan dengan analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika narasi kebijakan dalam ekosistem informasi digital yang dipengaruhi oleh disinformasi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber pengetahuan yang telah tersedia, sehingga relevan untuk menjelaskan hubungan antara pembentukan narasi kebijakan, penyebaran disinformasi, dan transformasi proses pengambilan keputusan publik. Desain SLR digunakan untuk melakukan sintesis sistematis terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu, sedangkan analisis kebijakan dimanfaatkan untuk menelaah implikasi fenomena disinformasi terhadap perubahan mekanisme agenda setting, formulasi kebijakan, serta legitimasi kebijakan publik. Pemilihan desain penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab kesenjangan penelitian terkait masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan perspektif narasi kebijakan, disinformasi digital, dan tata kelola informasi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma penelitian kualitatif yang menekankan konstruksi makna, interpretasi kontekstual, dan pengembangan pemahaman konseptual sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2018) serta Denzin dan Lincoln (2018).

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui publikasi ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan, artikel akademik, serta berbagai sumber institusional yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Penelusuran literatur dilakukan pada beberapa pangkalan data akademik utama, meliputi Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, dan Google Scholar untuk memperoleh cakupan referensi yang luas serta mutakhir. Literatur yang ditelaah dibatasi pada rentang publikasi tahun 2016–2026 dengan mempertimbangkan perkembangan signifikan ekosistem informasi digital, meningkatnya praktik disinformasi berbasis platform digital, serta munculnya berbagai kajian mengenai tata kelola informasi dan kebijakan publik digital dalam satu dekade terakhir. Proses pencarian menggunakan kombinasi kata kunci *policy narrative*, *policy narrative framework*, *disinformation*, *digital governance*, *public decision making*, dan *information ecosystem*, baik secara tunggal maupun melalui operator Boolean untuk meningkatkan akurasi hasil pencarian. Kriteria inklusi literatur mencakup artikel yang membahas narasi kebijakan, disinformasi, tata kelola digital, pengambilan keputusan publik, atau legitimasi kebijakan, diterbitkan dalam jurnal bereputasi, tersedia dalam teks lengkap, dan ditulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Sebaliknya, literatur yang bersifat duplikatif, tidak memiliki keterkaitan substantif dengan fokus penelitian, tidak dapat diakses secara

penuh, atau berasal dari sumber yang tidak terverifikasi dikeluarkan dari proses telaah.

Proses identifikasi dan seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan mengadaptasi tahapan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) tahun 2020. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu mengumpulkan seluruh artikel yang diperoleh melalui pencarian pada basis data yang telah ditentukan menggunakan kata kunci penelitian. Tahap berikutnya berupa *screening* atau penyaringan berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, tahun publikasi, dan jenis dokumen untuk menghilangkan artikel yang tidak relevan. Selanjutnya dilakukan tahap *eligibility* dengan membaca secara mendalam naskah lengkap untuk menilai kesesuaian substansi, kualitas metodologis, serta kontribusi konseptual terhadap tujuan penelitian. Tahap terakhir adalah *inclusion*, yaitu menetapkan artikel yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dianalisis lebih lanjut sebagai sumber utama penyusunan sintesis literatur. Artikel yang dipilih pada tahap akhir harus memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian, berasal dari jurnal bereputasi atau lembaga internasional yang kredibel, serta memberikan informasi yang memadai mengenai konstruksi narasi kebijakan, mekanisme penyebaran disinformasi, maupun perubahan proses pengambilan keputusan publik.

Analisis data dilakukan dengan mengombinasikan analisis tematik (*thematic analysis*) dan analisis kebijakan. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan proses pengkodean terhadap konsep-konsep utama yang muncul dari berbagai sumber literatur. Kode-kode tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam tema-tema yang lebih luas melalui proses kategorisasi konseptual, sehingga memungkinkan identifikasi pola hubungan antarvariabel dan pengembangan argumentasi teoritis. Tema-tema analisis meliputi pembentukan narasi kebijakan, kontestasi informasi digital, agenda setting, legitimasi kebijakan, serta peran aktor pemerintah, platform digital, media massa, dan masyarakat sipil dalam tata kelola informasi. Analisis kebijakan digunakan untuk menginterpretasikan implikasi disinformasi terhadap dinamika pengambilan keputusan publik, khususnya dalam proses agenda setting, formulasi kebijakan, dan pembentukan legitimasi kebijakan. Proses interpretasi dilakukan secara iteratif dengan membandingkan berbagai perspektif teoritis dan hasil penelitian terdahulu guna menghasilkan sintesis konseptual yang mampu menjelaskan transformasi pengambilan keputusan publik di tengah ekosistem informasi digital yang semakin kompleks. Pendekatan analisis tematik yang digunakan merujuk pada tahapan yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2021), yang menekankan identifikasi makna, keterkaitan antartema, serta konstruksi interpretasi yang sistematis.

Upaya menjaga kualitas, validitas, dan kredibilitas penelitian dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan yang berasal dari artikel jurnal internasional, dokumen kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, serta publikasi

akademik lainnya untuk mengurangi potensi bias interpretasi. Kedua, penggunaan referensi mutakhir dan bereputasi diutamakan guna memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan mencerminkan perkembangan terkini mengenai disinformasi digital dan narasi kebijakan. Ketiga, konsistensi antara tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, kerangka teoritis, metode analisis, dan interpretasi hasil dijaga selama seluruh proses penelitian berlangsung. Upaya menjaga kredibilitas penelitian dilakukan melalui penelaahan kritis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan serta membandingkan berbagai perspektif konseptual untuk memperoleh sintesis yang lebih komprehensif. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keterlacakan yang memadai, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta memungkinkan direplikasi oleh peneliti lain pada konteks dan isu kebijakan yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Narasi Kebijakan dalam Ekosistem Informasi Digital

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa narasi kebijakan pada era digital mengalami pergeseran dari model komunikasi institusional menuju arena kontestasi makna yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Pada paradigma komunikasi kebijakan konvensional, pemerintah memiliki posisi dominan sebagai produsen utama informasi sekaligus aktor yang menentukan arah interpretasi publik terhadap suatu kebijakan. Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi secara signifikan. Media sosial, platform digital, organisasi masyarakat sipil, komunitas daring, hingga individu pengguna media sosial memperoleh kapasitas yang relatif setara dalam memproduksi dan menyebarkan pesan kebijakan. Transformasi tersebut mengakibatkan komunikasi kebijakan tidak lagi berlangsung secara linear dari pemerintah kepada masyarakat, melainkan berkembang menjadi pola komunikasi multidirectional yang ditandai dengan interaksi simultan antaraktor. Perubahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun narasi yang mampu diterima dan dipertahankan dalam ruang publik digital.

Perspektif *Policy Narrative Framework* (PNF) yang dikembangkan oleh Michael D. Jones dan Mark K. McBeth memberikan landasan konseptual yang relevan untuk memahami perubahan tersebut. PNF memandang kebijakan publik sebagai konstruksi cerita yang dibentuk melalui interaksi antara berbagai elemen naratif, seperti *heroes*, *villains*, *victims*, dan *moral of the story*. Dalam konteks ekosistem informasi digital, pemerintah tidak lagi secara otomatis menempati posisi sebagai aktor heroik yang berupaya menyelesaikan persoalan publik. Berbagai kelompok kepentingan, influencer politik, media massa, maupun komunitas digital dapat merekonstruksi narasi dengan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang dianggap gagal, tidak responsif, atau bahkan menjadi sumber permasalahan.

Sebaliknya, kelompok masyarakat tertentu dapat diposisikan sebagai korban kebijakan, sementara aktor nonpemerintah berusaha membangun citra sebagai pembela kepentingan publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa narasi kebijakan merupakan arena pertarungan simbolik yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika komunikasi digital.

Temuan kajian juga menunjukkan bahwa platform digital telah berkontribusi terhadap meningkatnya kecepatan penyebaran narasi kebijakan sekaligus memperluas ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan opini. Berbeda dengan media konvensional yang cenderung memiliki mekanisme penyaringan informasi melalui proses editorial, media sosial memungkinkan berbagai bentuk interpretasi berkembang secara spontan dan tidak terkontrol. Situasi ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam mendukung maupun menolak suatu kebijakan publik. Akan tetapi, perluasan partisipasi tersebut tidak selalu menghasilkan deliberasi yang berkualitas karena sering kali dipengaruhi oleh preferensi politik, sentimen emosional, serta kecenderungan untuk memperkuat identitas kelompok tertentu. Dengan demikian, ruang digital dapat berfungsi sebagai sarana demokratisasi komunikasi kebijakan sekaligus menjadi medium yang memperbesar polarisasi opini publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas diskursus kebijakan.

Dalam perspektif legitimasi kebijakan, perubahan pola komunikasi ini membawa implikasi penting terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Legitimasi kebijakan pada masa sebelumnya lebih banyak ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum dan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Namun, dalam konteks digital, legitimasi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mempertahankan kredibilitas narasi kebijakan di tengah kompetisi informasi yang berlangsung secara terus-menerus. Pemerintah dituntut untuk membangun komunikasi yang transparan, responsif, serta mampu menjelaskan dasar rasional kebijakan secara mudah dipahami oleh masyarakat. Kegagalan dalam mengelola komunikasi publik dapat membuka ruang bagi munculnya interpretasi alternatif yang berpotensi melemahkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, legitimasi kebijakan tidak lagi hanya dibangun melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui proses komunikasi yang adaptif terhadap dinamika ruang digital.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menyesuaikan strategi komunikasi dengan karakteristik platform digital yang digunakan masyarakat. Kajian mengenai komunikasi kebijakan digital menegaskan bahwa pesan yang bersifat teknokratis sering kali kurang mampu menarik perhatian publik dibandingkan narasi yang disampaikan secara sederhana, emosional, dan personal. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kelompok kepentingan atau influencer politik sering memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk persepsi masyarakat dibandingkan

institusi pemerintah. Oleh karena itu, strategi komunikasi kebijakan pada era digital perlu mempertimbangkan aspek emosional dan simbolik tanpa mengabaikan prinsip akurasi informasi. Pendekatan ini menjadi penting agar pemerintah dapat mempertahankan posisi sebagai sumber informasi yang kredibel di tengah meningkatnya kompetisi narasi dalam ekosistem digital.

Secara keseluruhan, sintesis literatur memperlihatkan bahwa transformasi narasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perubahan media komunikasi, tetapi juga mencerminkan perubahan struktur kekuasaan dalam proses pembentukan opini publik. Pemerintah tidak lagi memiliki monopoli dalam menentukan makna suatu kebijakan karena interpretasi publik dibentuk melalui interaksi kompleks antaraktor yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan strategi komunikasi yang berbeda. Temuan ini memperluas perspektif PNF dengan menunjukkan bahwa konstruksi narasi kebijakan pada era digital sangat dipengaruhi oleh karakteristik algoritmik platform komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa pemahaman bahwa narasi kebijakan pada era disinformasi harus dipandang sebagai proses negosiasi makna yang berlangsung secara dinamis dalam jaringan komunikasi digital yang terfragmentasi.

2. Disinformasi sebagai Faktor Transformasi Pengambilan Keputusan Publik

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa disinformasi telah berkembang menjadi faktor eksternal yang memengaruhi rasionalitas pengambilan keputusan publik, terutama ketika pemerintah dihadapkan pada tekanan opini publik yang berkembang secara cepat di ruang digital. Disinformasi tidak hanya dipahami sebagai penyebaran informasi yang tidak akurat, tetapi juga sebagai praktik komunikasi yang secara sengaja dirancang untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap isu tertentu. Claire Wardle dan Hossein Derakhshan menjelaskan bahwa disinformasi memiliki karakteristik manipulatif karena bertujuan menciptakan kebingungan, memperbesar konflik sosial, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam konteks kebijakan publik, kondisi tersebut dapat memengaruhi cara pemerintah mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, serta memilih alternatif kebijakan yang dianggap paling tepat. Dengan demikian, disinformasi memiliki kapasitas untuk mengubah orientasi pengambilan keputusan yang semula berbasis bukti menjadi lebih dipengaruhi oleh tekanan politik dan opini publik digital.

Pengaruh disinformasi terhadap proses agenda setting terlihat dari meningkatnya kecenderungan pemerintah memberikan perhatian lebih besar pada isu yang memperoleh eksposur tinggi di media sosial. Pada situasi tertentu, isu yang sebenarnya memiliki dampak terbatas dapat berkembang menjadi agenda prioritas karena memperoleh dukungan luas dari masyarakat pengguna platform digital. Sebaliknya, persoalan yang memiliki tingkat urgensi tinggi justru dapat terabaikan apabila tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam ruang publik digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa agenda setting tidak lagi sepenuhnya

dikendalikan oleh institusi pemerintah maupun media massa, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika percakapan digital yang berlangsung secara real time. Kecepatan penyebaran informasi menjadikan pemerintah harus merespons berbagai isu dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, proses penyusunan agenda kebijakan berpotensi mengalami distorsi akibat dominasi informasi yang belum terverifikasi.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa fenomena *information overload*, *echo chamber*, dan *filter bubble* memperkuat dampak negatif disinformasi terhadap proses formulasi kebijakan. Masyarakat menghadapi jumlah informasi yang sangat besar sehingga mengalami kesulitan membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang menyesatkan. Algoritma platform digital cenderung merekomendasikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga mempersempit peluang individu untuk memperoleh perspektif yang berbeda. Kondisi ini mendorong terbentuknya kelompok-kelompok homogen yang saling memperkuat keyakinan masing-masing tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Selain itu, praktik *microtargeting* memungkinkan penyebaran pesan yang disesuaikan dengan karakteristik audiens tertentu sehingga memperbesar potensi manipulasi opini publik. Situasi tersebut menyebabkan proses komunikasi kebijakan menjadi semakin kompleks karena pemerintah harus berhadapan dengan berbagai persepsi masyarakat yang terfragmentasi.

Konsep *bounded rationality* yang dikemukakan Herbert A. Simon memberikan penjelasan teoritis mengenai keterbatasan kapasitas pembuat kebijakan dalam menghadapi arus informasi digital yang sangat besar. Simon berpendapat bahwa pengambilan keputusan tidak selalu dilakukan secara rasional karena individu memiliki keterbatasan dalam memperoleh, mengolah, dan mengevaluasi informasi yang tersedia. Dalam konteks era disinformasi, keterbatasan tersebut semakin diperkuat oleh tekanan opini publik yang berkembang secara cepat melalui media sosial. Pemerintah dapat terdorong mengambil keputusan yang bersifat reaktif untuk meredam kritik masyarakat tanpa melakukan analisis mendalam mengenai konsekuensi jangka panjang kebijakan yang diambil. Keputusan yang dihasilkan dalam kondisi demikian berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan serta menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi. Dengan demikian, rasionalitas pengambilan keputusan publik menjadi semakin rentan terhadap pengaruh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan informasi digital.

Perspektif *evidence-based policy making* yang dikembangkan Paul Cairney menegaskan pentingnya penggunaan bukti ilmiah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Akan tetapi, hasil kajian menunjukkan bahwa meningkatnya tekanan opini publik digital sering kali mendorong pemerintah lebih mempertimbangkan kalkulasi politik dibandingkan rekomendasi berbasis penelitian. Situasi tersebut menyebabkan proses *policy learning* tidak berlangsung secara optimal karena pembuat kebijakan cenderung mengutamakan respons cepat terhadap tuntutan masyarakat. Dalam jangka panjang, kecenderungan ini dapat mengurangi kapasitas institusi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang

konsisten, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah struktural. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme verifikasi informasi dan peningkatan literasi digital menjadi prasyarat penting dalam menjaga kualitas proses pengambilan keputusan publik.

Sintesis berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa disinformasi bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi tantangan tata kelola kebijakan publik. Disinformasi mampu memengaruhi pembentukan agenda, mengubah persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan, serta memperlemah legitimasi institusi pemerintah. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pengambilan keputusan yang bersifat teknokratis menuju proses yang semakin dipengaruhi oleh dinamika informasi digital. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penegasan bahwa disinformasi perlu diposisikan sebagai variabel penting dalam analisis kebijakan kontemporer karena memiliki implikasi langsung terhadap kualitas demokrasi dan kapasitas negara dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis bukti.

3. Kontestasi Narasi dan Relasi Antaraktor dalam Tata Kelola Digital

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa tata kelola informasi pada era digital ditandai oleh meningkatnya interdependensi antaraktor dalam proses pembentukan, penyebaran, dan koreksi narasi kebijakan. Pemerintah tidak lagi beroperasi sebagai aktor tunggal yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah komunikasi publik, melainkan harus berinteraksi dengan platform digital, media massa, organisasi masyarakat sipil, komunitas epistemik, serta masyarakat pengguna media sosial. Hubungan antaraktor tersebut membentuk suatu jaringan komunikasi yang bersifat dinamis, terbuka, dan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan isu yang muncul di ruang publik digital. Dalam kondisi demikian, setiap aktor berupaya membangun interpretasi tertentu terhadap suatu kebijakan berdasarkan kepentingan, sumber daya, dan kapasitas komunikasinya masing-masing. Interaksi yang berlangsung tidak hanya bersifat kolaboratif, tetapi juga kompetitif karena setiap aktor memiliki kepentingan untuk memperoleh legitimasi dan pengaruh dalam proses pembentukan opini publik. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola digital merupakan arena kontestasi yang mempertemukan berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik dalam satu ruang komunikasi yang saling terhubung.

Perspektif *digital governance* memberikan penjelasan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara negara dan masyarakat dari model birokratis menuju model yang lebih partisipatif dan berbasis jaringan. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi publik tidak selalu diikuti dengan distribusi kekuasaan yang seimbang di antara para aktor. Platform digital memiliki kapasitas yang sangat besar dalam menentukan visibilitas suatu isu melalui mekanisme algoritmik yang mengatur penyebaran konten kepada

pengguna. Algoritma rekomendasi dapat memperkuat narasi tertentu sekaligus membatasi jangkauan informasi lain yang dianggap kurang menarik secara komersial maupun kurang sesuai dengan preferensi pengguna. Kondisi tersebut menimbulkan asimetri informasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan teknologi karena proses seleksi informasi berlangsung secara tertutup dan sulit diawasi oleh publik. Dengan demikian, dominasi algoritma platform berpotensi memengaruhi arah diskursus kebijakan tanpa melalui mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Temuan literatur juga memperlihatkan bahwa media massa tetap memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi publik meskipun menghadapi kompetisi yang semakin kuat dari media sosial. Media konvensional masih berperan sebagai aktor yang menyediakan verifikasi informasi, melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, serta membantu masyarakat memahami substansi kebijakan yang kompleks. Namun demikian, tekanan ekonomi dan perubahan pola konsumsi informasi mendorong sebagian media mengadopsi strategi pemberitaan yang lebih berorientasi pada popularitas isu dibandingkan kedalaman analisis. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan advokasi kebijakan, edukasi publik, serta koreksi terhadap informasi yang menyesatkan. Masyarakat pengguna media sosial juga tidak lagi berperan sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai produsen konten yang dapat memengaruhi persebaran narasi kebijakan melalui aktivitas berbagi, komentar, maupun kampanye digital. Interaksi antara berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pembentukan opini publik merupakan hasil negosiasi berkelanjutan yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh satu institusi tertentu.

Perspektif *collaborative governance* yang dikembangkan Christopher Ansell dan Alison Gash memberikan kerangka analitis untuk memahami pentingnya kolaborasi antaraktor dalam menghadapi kompleksitas ekosistem informasi digital. Tata kelola kolaboratif menekankan perlunya keterlibatan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pengguna dalam proses penyelesaian masalah publik. Namun, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut sering menghadapi hambatan berupa ketimpangan akses informasi, perbedaan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya tingkat kepercayaan antaraktor. Pemerintah pada banyak kasus masih menerapkan pola komunikasi yang bersifat satu arah, sedangkan platform digital lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan kepentingan publik. Kondisi ini menyebabkan upaya bersama untuk mengendalikan penyebaran disinformasi sering kali berlangsung secara parsial dan belum menghasilkan mekanisme koordinasi yang efektif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif memerlukan komitmen bersama untuk membangun transparansi, berbagi informasi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan ruang digital.

Fenomena fragmentasi ruang publik digital semakin memperumit proses pembentukan legitimasi kebijakan. Berbeda dengan ruang publik konvensional yang relatif terintegrasi melalui media arus utama, ruang publik digital cenderung terbagi

ke dalam berbagai komunitas yang memiliki preferensi politik dan ideologi yang berbeda. Akibatnya, narasi kebijakan yang diterima positif oleh satu kelompok masyarakat belum tentu memperoleh dukungan dari kelompok lainnya. Fragmentasi tersebut memperbesar risiko terjadinya polarisasi sosial serta memperlemah kapasitas pemerintah dalam membangun konsensus publik mengenai suatu kebijakan. Selain itu, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah menyebabkan informasi resmi sering kali dipersepsikan secara skeptis, terutama ketika terdapat pengalaman buruk terkait kebijakan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pemerintah pada era digital bukan hanya menghasilkan kebijakan yang efektif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang semakin heterogen dan kritis.

Pembentukan legitimasi kebijakan pada era disinformasi tidak hanya bergantung pada kualitas substansi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam mengelola dinamika informasi dan membangun kepercayaan publik. Legitimasi tidak lagi dapat diperoleh hanya melalui prosedur formal dan kewenangan hukum, melainkan harus dibangun melalui komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif terhadap perubahan pola konsumsi informasi serta mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat keterlibatan publik. Dengan demikian, tata kelola digital yang efektif memerlukan keseimbangan antara penggunaan teknologi, penguatan kolaborasi antaraktor, dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan disinformasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik pada era digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara mengelola relasi sosial dan komunikasi dalam jaringan informasi yang semakin kompleks.

4. Model Konseptual Transformasi Pengambilan Keputusan Publik di Era Disinformasi

Berdasarkan hasil sintesis literatur, penelitian ini menawarkan suatu perspektif konseptual yang menggambarkan bahwa disinformasi digital berperan sebagai faktor pemicu terjadinya kontestasi narasi kebijakan, yang selanjutnya memengaruhi persepsi publik, proses *agenda setting*, formulasi kebijakan, hingga pembentukan legitimasi kebijakan publik. Model konseptual ini disusun sebagai hasil integrasi berbagai perspektif teoritis, yaitu *Policy Narrative Framework*, teori rasionalitas terbatas, *evidence-based policy making*, serta pendekatan tata kelola kolaboratif dan tata kelola digital. Berbeda dengan model pengambilan keputusan publik konvensional yang cenderung memandang proses kebijakan berlangsung secara linear, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pada era digital berlangsung secara sirkular dan dipengaruhi oleh interaksi yang terus berubah antara informasi, teknologi, serta perilaku aktor kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak lagi dipahami sebagai produk akhir dari proses

administratif, melainkan sebagai hasil negosiasi yang berlangsung secara berulang dalam ruang komunikasi digital. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara dinamika informasi dan perubahan proses kebijakan publik.

Tahapan pertama dalam model konseptual ini adalah keberadaan disinformasi digital sebagai faktor pemicu yang memengaruhi ekosistem informasi. Disinformasi berkembang melalui berbagai saluran komunikasi digital, termasuk media sosial, aplikasi pesan instan, situs berita alternatif, maupun jaringan akun anonim yang memanfaatkan karakteristik algoritmik platform digital. Penyebaran informasi yang menyesatkan menyebabkan masyarakat menghadapi kesulitan dalam membedakan informasi faktual dan informasi manipulatif. Kondisi tersebut memperbesar kemungkinan munculnya interpretasi yang berbeda terhadap isu kebijakan yang sama. Selain itu, praktik *microtargeting*, *echo chamber*, dan *filter bubble* semakin memperkuat fragmentasi informasi yang diterima masyarakat. Akibatnya, ruang publik digital menjadi arena yang sangat rentan terhadap pertarungan narasi yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik maupun ekonomi.

Tahapan berikutnya adalah munculnya kontestasi narasi kebijakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya intensitas penyebaran informasi digital. Pemerintah, media massa, platform digital, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat pengguna media sosial berupaya membangun interpretasi masing-masing mengenai suatu persoalan kebijakan. Dalam proses tersebut, elemen-elemen naratif seperti *heroes*, *villains*, *victims*, dan *moral of the story* digunakan untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap aktor dan substansi kebijakan tertentu. Kontestasi narasi yang berlangsung secara terus-menerus akan membentuk respons publik yang beragam, mulai dari dukungan, kritik, resistensi, hingga tuntutan perubahan kebijakan. Respons masyarakat tersebut kemudian menjadi sumber tekanan politik yang dapat memengaruhi prioritas pemerintah dalam menentukan agenda kebijakan. Dengan demikian, persepsi publik memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara dinamika komunikasi digital dan proses pengambilan keputusan publik.

Pada tahap selanjutnya, perubahan persepsi publik akan memengaruhi proses *agenda setting* dan formulasi kebijakan. Pemerintah cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap isu yang memperoleh eksposur tinggi di ruang digital, terutama apabila isu tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, tekanan opini publik dapat mendorong pembuat kebijakan mengambil keputusan yang bersifat cepat dan responsif meskipun belum didukung oleh bukti empiris yang memadai. Perspektif Herbert Simon mengenai *bounded rationality* menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas pengambilan keputusan dalam situasi kompleks menyebabkan pemerintah lebih mengandalkan informasi yang tersedia secara cepat dibandingkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai alternatif kebijakan. Akibatnya, proses formulasi kebijakan menjadi semakin rentan terhadap pengaruh sentimen publik

yang berkembang di media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasionalitas kebijakan pada era disinformasi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sebelumnya tidak memperoleh perhatian besar dalam studi kebijakan publik.

Tahap akhir dalam model konseptual ini adalah pembentukan legitimasi kebijakan dan pengambilan keputusan publik. Legitimasi tidak lagi dipahami hanya sebagai hasil kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga sebagai konsekuensi dari kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi yang efektif. Kebijakan yang disusun berdasarkan bukti ilmiah sekalipun dapat menghadapi resistensi apabila gagal dikomunikasikan secara transparan dan meyakinkan kepada masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang memperoleh dukungan luas melalui narasi yang persuasif belum tentu memiliki kualitas substantif yang memadai. Oleh karena itu, legitimasi kebijakan pada era digital harus dipandang sebagai hasil interaksi antara kualitas kebijakan, efektivitas komunikasi publik, tingkat kepercayaan masyarakat, serta kapasitas pemerintah dalam mengelola dinamika informasi. Pemahaman tersebut memperluas konsep legitimasi kebijakan yang selama ini lebih banyak berorientasi pada dimensi prosedural dan administratif.

Kontribusi konseptual utama penelitian ini terletak pada pengembangan model transformasi pengambilan keputusan publik di era disinformasi yang menempatkan narasi kebijakan sebagai variabel penghubung antara lingkungan informasi digital dan proses kebijakan publik. Model ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan publik tidak lagi berlangsung secara linear, tetapi berkembang menjadi proses adaptif yang dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara disinformasi, kontestasi narasi, persepsi masyarakat, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, serta legitimasi publik. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik dan komunikasi kebijakan dengan menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana perubahan struktur informasi digital mengubah mekanisme pengambilan keputusan dalam pemerintahan modern. Model konseptual tersebut juga dapat dijadikan dasar bagi penelitian empiris selanjutnya untuk menguji pengaruh masing-masing variabel dalam konteks kebijakan tertentu, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif narasi kebijakan, disinformasi digital, dan legitimasi kebijakan ke dalam satu kerangka analitis yang menjelaskan transformasi pengambilan keputusan publik pada era ekosistem informasi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disinformasi telah mengubah secara fundamental dinamika pembentukan narasi kebijakan dan proses pengambilan keputusan publik dalam ekosistem informasi digital. Hasil kajian mengindikasikan bahwa narasi kebijakan pada era digital tidak lagi diproduksi dan dikendalikan secara dominan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, melainkan berkembang menjadi arena kontestasi yang melibatkan platform digital, media massa, kelompok

kepentingan, komunitas daring, organisasi masyarakat sipil, serta individu yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi persepsi publik. Intensitas penyebaran informasi yang tinggi, karakter algoritmik media digital, serta rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam memverifikasi informasi memperkuat peluang munculnya disinformasi yang dapat membentuk preferensi publik dan menggeser prioritas agenda kebijakan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan publik mengalami transformasi dari model yang cenderung linear, hierarkis, dan berbasis otoritas formal menuju proses yang lebih dinamis, interaktif, serta dipengaruhi oleh arus informasi digital yang berlangsung secara real time. Transformasi tersebut mencerminkan meningkatnya kompleksitas lingkungan kebijakan yang menuntut pemerintah untuk tidak hanya mempertimbangkan bukti empiris dan pertimbangan teknokratis, tetapi juga memahami konstruksi narasi yang berkembang dalam ruang digital. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan perubahan hubungan antara disinformasi, narasi kebijakan, dan pengambilan keputusan publik dapat dikatakan telah tercapai melalui sintesis literatur dan analisis kebijakan yang dilakukan.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif *Policy Narrative Framework* (PNF), kajian disinformasi digital, tata kelola digital, dan teori pengambilan keputusan publik ke dalam suatu kerangka analisis yang lebih komprehensif. Penelitian ini menawarkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara disinformasi digital, kontestasi narasi kebijakan, pembentukan persepsi publik, proses *agenda setting*, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, serta pengambilan keputusan publik sebagai suatu rangkaian proses yang saling memengaruhi. Hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pada era digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun narasi yang kredibel, mempertahankan kepercayaan publik, dan mengelola ruang informasi secara adaptif. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana legitimasi kebijakan dapat mengalami penguatan maupun pelemahan akibat interaksi antara informasi yang berbasis fakta dan narasi disinformasi yang beredar di ruang digital. Secara teoretis, temuan penelitian ini memiliki implikasi terhadap pengembangan studi kebijakan publik digital dengan menempatkan narasi kebijakan sebagai variabel penting dalam menjelaskan perubahan tata kelola kontemporer. Secara praktis, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi kebijakan, meningkatkan kapasitas manajemen informasi publik, mengembangkan sistem deteksi dini terhadap disinformasi, serta mendorong peningkatan literasi digital masyarakat guna menjaga kualitas proses pengambilan keputusan dan legitimasi kebijakan publik.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* dan analisis konseptual, sehingga belum mampu menguji secara empiris hubungan antarvariabel yang telah dirumuskan dalam model konseptual yang ditawarkan. Keterbatasan lainnya adalah

ketergantungan pada temuan penelitian terdahulu yang memiliki konteks, wilayah, serta fokus kebijakan yang beragam, sehingga generalisasi hasil kajian perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris melalui studi kasus pada kebijakan tertentu, seperti kebijakan kesehatan, penyelenggaraan pemilu, perubahan iklim, maupun transformasi digital pemerintahan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyebaran disinformasi. Selain itu, penelitian mendatang dapat memanfaatkan analisis media sosial, wawancara mendalam dengan aktor kebijakan, survei persepsi publik, maupun pendekatan *mixed methods* untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengaruh disinformasi terhadap proses kebijakan. Penggunaan data digital secara longitudinal juga berpotensi memperkaya pemahaman mengenai perubahan pola interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan kajian kebijakan publik yang lebih adaptif terhadap tantangan disinformasi, sekaligus mendorong terciptanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan legitimasi demokratis dalam ekosistem informasi digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139.
<https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Cairney, P. (2016). *The politics of evidence-based policy making*. Palgrave Macmillan.
- Crow, D. A., & Jones, M. D. (2018). Narratives as tools for influencing policy change. *Policy & Politics*, 46(2), 217–234.
<https://doi.org/10.1332/030557318X15230059735586>
- Dahlstrom, M. F. (2014). Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(Supplement 4), 13614–13620.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1320645111>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2018). Learning in the bath-tub: The micro and macro dimensions of the causal relationship between learning and policy change. *Policy and Society*, 37(2), 304–319.

<https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1504487>

- Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Cook, J., Schmid, P., Fazio, L. K., Brashier, N., Kendeou, P., Vraga, E. K., & Amazeen, M. A. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. *Nature Reviews Psychology*, 1(1), 13–29. <https://doi.org/10.1038/s44159-021-00006-y>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2021). Digital media and misinformation: Challenges and opportunities. *Journal of Communication*, 71(1), 1–15. <https://doi.org/10.1093/joc/jqaa040>
- Howlett, M. (2019). *Designing public policies: Principles and instruments* (2nd ed.). Routledge.
- Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong? *Policy Studies Journal*, 38(2), 329–353. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00364.x>
- Jones, M. D., Shanahan, E. A., & McBeth, M. K. (2014). *The science of stories: Applications of the Narrative Policy Framework in public policy analysis*. Palgrave Macmillan.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the web. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 371(1987), 20120382. <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382>
- Meijer, A., & Thaens, M. (2018). Urban technological innovation: Developing and testing a sociotechnical framework for studying smart city projects. *Urban Affairs Review*, 54(2), 363–387. <https://doi.org/10.1177/1078087416670274>
- Mosleh, M., Martel, C., Eckles, D., & Rand, D. G. (2021). Shared partisanship dramatically increases social tie formation in a social network experiment. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(7), e2022761118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2022761118>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2018). How to conduct a Narrative Policy Framework study. *The Social Science Journal*, 55(3), 332–345. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.12.002>
- Shanahan, E. A., Jones, M. D., McBeth, M. K., & Lane, R. R. (2013). An angel on the wind: How heroic policy narratives shape policy realities. *Policy Studies Journal*, 41(3), 453–483. <https://doi.org/10.1111/psj.12025>
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations* (4th ed.). Free Press.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Radical and disruptive answers to downstream problems in collaborative governance? *Public Management Review*, 23(11), 1590–1611. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1718187>
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., De Vreese, C., Matthes, J., Hopmann, D., Salgado, S., Hubé, N., Stępińska, A., Papathanassopoulos, S., Berganza, R., Legnante, G., Reinemann, C., Sheaffer, T., & Stanyer, J. (2017). Political communication in a high-choice media environment: A challenge for democracy? *Annals of the International Communication Association*, 41(1), 3–27. <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.
- Weible, C. M., Schlager, E., & Sabatier, P. A. (2011). A comparison of theories of the policy process. *Policy Studies Journal*, 39(1), 1–31. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00394.x>
- Zhang, Y., Wells, C., Wang, S., & Rohe, K. (2018). Attention and amplification in the hybrid media system: The composition and activity of Donald Trump’s Twitter following during the 2016 presidential election. *New Media & Society*, 20(9), 3161–3182. <https://doi.org/10.1177/1461444817744390>